KETEPATAN PENERAPAN KURANG PIHAK DAN KETIDAKJELASAN HUBUNGAN HUKUM SEBAGAI PERTIMBANGAN DALAM PENOLAKAN PERMOHONAN KASASI

(STUDI KASUS: PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2619 K/PDT/2024)

NABILA SALMA NAJWAGITA WIDYANDINI SUNARDI

213300516045

SKRIPSI

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

2026

THE ACCURACY OF NON-JOINDER OF PARTIES IMPLEMENTATION AND THE AMBIGUITY OF LEGAL RELATIONSHIP AS CONSIDERATIONS FOR CASSATION PETITION REJECTION

(CASE STUDY OF SUPREME COURT DECISION NUMBER 2619 K/PDT/2024)

NABILA SALMA NAJWAGITA WIDYANDINI SUNARDI

213300516045

THESIS

BACHELOR PROGRAM

LEGAL SCIENCE STUDY PROGRAM

FACULTY OF LAW

2026

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi:

"KETEPATAN PENERAPAN KURANG PIHAK DAN KETIDAKJELASAN HUBUNGAN HUKUM SEBAGAI PERTIMBANGAN DALAM PENOLAKAN PERMOHONAN KASASI (STUDI KASUS: PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2619 K/PDT/2024)"

Skripsi ini telah kami setujui untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Nasional.

Jakarta, 20 Agustus 2026

Mengetahui,

Dekan,	Pembimbing,
Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S.	Dr. Albert Tanjung, S.H., M.Kn., CLA.

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	Nabila Salma Najwagita Widyandini Sunardi
Tempat, Tanggal Lahir	:	Bekasi, 02 Juni 2003
Nomor Pokok Mahasiswa	:	213300516045
Fakultas	:	Hukum
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Universitas	:	Universitas Nasional
HP/Telepon	:	089608679011

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya buat dengan judul "**KETEPATAN PENERAPAN KURANG PIHAK DAN KETIDAKJELASAN HUBUNGAN HUKUM SEBAGAI PERTIMBANGAN DALAM PENOLAKAN PERMOHONAN KASASI (STUDI KASUS: PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2619 K/PDT/2024)**" adalah benar karya saya sendiri dan belum pernah dipublikasikan. Seluruh data yang saya gunakan di dalam penelitian skripsi ini melalui penelitian kepustakaan dan/atau menggunakan penelitian lapangan. Bila kemudian terbukti skripsi ini hasil plagiat, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan secara hukum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dari siapapun.

Jakarta, 20 Agustus 2026

Nabila Salma NWS.

UNIVERSITAS NASIONAL

TANDA PENGESAHAN DAN PENILAIAN SKRIPSI

Judul Skripsi: KETEPATAN PENERAPAN KURANG PIHAK DAN KETIDAKJELASAN HUBUNGAN HUKUM SEBAGAI PERTIMBANGAN DALAM PENOLAKAN PERMOHONAN KASASI (STUDI KASUS: PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2619 K/PDT/2024)

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji pada tanggal 31 Agustus 2026 dan di nyatakan LULUS dengan nilai A.

Jakarta, September 2026

Mengetahui,

Dekan,	Pembimbing,
Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S.	Dr. Albert Tanjung, S.H., M.Kn., CLA.

Tim Penguji

Ketua,	Anggota,	Anggota,
Dr. Afnaini, S.H., M.Si.	Mahruf, S.H., M.H.	Dr. Albert Tanjung, S.H., M.Kn., CLA.

ABSTRAK

PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS NASIONAL
Program Studi Ilmu Hukum
Skripsi Agustus 2026

A. Nama Penulis : Nabila Salma Najwagita Widyandini Sunardi
B. Nomor Pokok Mahasiswa : 213300516045
C. Judul Skripsi : Ketepatan Penerapan Kurang Pihak dan Ketidakjelasan Hubungan Hukum sebagai Pertimbangan dalam Penolakan Permohonan Kasasi (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 2619 K/Pdt/2024)
D. Jumlah Halaman : xiv Halaman Pengantar, 160 Halaman isi
E. Abstrak :

Pertimbangan hukum hakim dalam mengadili suatu perkara harus sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Pertimbangan hukum yang keliru mengakibatkan kerugian terhadap hak-hak hukum yang seharusnya diperoleh pihak-pihak dalam suatu perkara, seperti pertimbangan hukum mengenai kurang pihak dan ketidakjelasan hukum dalam perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 2619 K/Pdt/2024. Dalam hal ini majelis hakim mempertimbangkan bahwa terdapat kurang pihak dan ketidakjelasan hubungan hukum yang menjadi dasar memberikan amar putusan gugatan tidak dapat diterima. Ini lah yang menjadi permasalahan penelitian ini terutama dalam ketepatan penerapannya serta segala akibat yang timbul dari amar putusan tersebut terhadap kedudukan para pihak. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketepatan penerapan kurang pihak dan hubungan hukum dalam pertimbangan hukum hakim sangat memengaruhi kepastian hukum kedudukan hukum Pemohon terutama setelah penolakan permohonan kasasi, akibatnya kedudukan hukum Pemohon dalam perjanjian yang menjadi objek sengketa juga tidak memiliki kepastian hukum dan dapat dengan mudah dibantahkan oleh pihak lawan.

Kata Kunci: Kurang Pihak, Hubungan Hukum, Permohonan Kasasi.

F. Daftar Pustaka : 61 (40 Buku, 7 Peraturan Perundang-undangan, 8 Jurnal, 3 Skripsi, 3 Laman Internet)
G. Dosen Pembimbing : Dr. Albert Tanjung, S.H., M.Kn., C.L.A.

ABSTRACT

National University Undergraduate Program
Legal Studies Program
Thesis August 2026

A. Author's Name : Nabila Salma Najwagita Widyandini Sunardi
B. Student ID Number : 213300516045
C. Thesis Title : The Accuracy Of Non-Joinder Of Parties Implementation And The Ambiguity Of Legal Relationship As Considerations For Cassation Petition Rejection (Case Study of Supreme Court Decision Number 2619 K/Pdt/2024)
D. Number of Pages : xiv Introduction page, 160 contents page
E. Abstract :

A judge's legal reasoning in adjudicating a case must be consistent with applicable legal norms. Erroneous legal considerations result in a violation of the legal rights that the parties to a case should have obtained, such as the legal considerations regarding the lack of parties and legal ambiguity in Supreme Court Decision No. 2619 K/Pdt/2024. In this case, the panel of judges considered that there was a lack of parties and a lack of clarity regarding the legal relationship, which served as the basis for ruling that the lawsuit was inadmissible. This is the focus of this study, particularly regarding the accuracy of its application and all the consequences arising from that ruling regarding the legal standing of the parties. This study employs a normative legal research approach through a literature review of primary, secondary, and tertiary legal sources. The results of the study indicate that the accuracy of the application of the "non-joinder of parties" doctrine and legal relationships in the judge's legal reasoning significantly affects the legal certainty of the appellant's legal standing, particularly after the rejection of the appeal. Consequently, the appellant's legal standing in the agreement that is the subject of the dispute also lacks legal certainty and can easily be challenged by the opposing party.

Keywords: Non-joinder of Parties, Legal Relationship, Cassation Petition.

F. Bibliography : 61 (40 Books, 7 Legislations, 8 Journal, 3 Thesis, 3 Websites)
G. Supervisor : Dr. Albert Tanjung, S.H., M.Kn., C.L.A.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI ..... **ii**
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... **iii**
TANDA PENGESAHAN DAN PENILAIAN SKRIPSI ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
ABSTRACT ..... **vi**
KATA PENGANTAR ..... **vii**
DAFTAR ISI ..... **x**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xiv**
BAB I
PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 8
1. Tujuan Penelitian 8
2. Manfaat Penelitian 9
D. Kerangka Teori dan Konseptual 9
1. Kerangka Teori 9
2. Kerangka Konseptual 17
E. Metode Penelitian 19
1. Jenis Penelitian 19
2. Pendekatan Penelitian 21
3. Sumber Bahan Hukum 22
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 25
5. Analisis Bahan Hukum 25
F. Sistematika Penulisan 25
BAB II
TINJAUAN UMUM PERTIMBANGAN HUKUM TERHADAP KEABSAHAN GUGATAN **28**
A. Ketentuan Umum tentang Gugatan 28

1. Pengertian Gugatan 28
2. Dasar Hukum 30
3. Asas-asas Gugatan 31
4. Macam-macam Gugatan 34
5. Syarat Formil Gugatan 40
6. Alasan-alasan dan Akibat Hukum Tidak Terpenuhinya Syarat Formil Gugatan 44
7. Syarat Materil Gugatan 51
8. Alasan-alasan dan Akibat Hukum Tidak Terpenuhinya Syarat Materil Gugatan 56
B. Ketentuan Umum Hubungan Hukum 59
1. Pengertian Hubungan Hukum 59
2. Sumber Hubungan Hukum 61
3. Dasar Hukum 69
4. Asas-asas Hubungan Hukum 70
5. Macam-macam Hubungan Hukum 73
6. Syarat Sah Hubungan Hukum 75
7. Pihak-pihak yang Terikat dalam Hubungan Hukum 75
8. Akibat Hukum Hubungan Hukum 79
C. Ketentuan Umum Perjanjian 82
1. Pengertian Perjanjian 82
2. Dasar Hukum 83
3. Syarat Sah Perjanjian 84
4. Asas-asas Perjanjian 87
5. Macam-macam Perjanjian 90
6. Berakhirnya Perjanjian 93
7. Wanprestasi dalam Perjanjian 97
D. Pertimbangan Hukum sebagai Dasar Amar Putusan 101
1. Pengertian Pertimbangan Hukum 101
2. Asas-asas Pertimbangan Hukum 102
3. Dasar Hukum 105

4. Kewenangan Hakim dalam Melakukan Pertimbangan Hukum 108
5. Macam-macam Alat Bukti 112
6. Kedudukan Alat Bukti dalam Pertimbangan Hukum..... 119
7. Akibat Hukum Keabsahan Alat Bukti 121
8. Relevansi antara Pertimbangan Hukum dengan Amar Putusan..... 122

BAB III

FAKTA YURIDIS KETEPATAN PENERAPAN KURANG PIHAK DAN KETIDAKJELASAN HUBUNGAN HUKUM SEBAGAI PERTIMBANGAN DALAM PENOLAKAN PERMOHONAN KASASI (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2619K/Pdt/2024) 126

A. Kedudukan Hukum Para Pihak 126
1. Pengadilan Negeri 126
2. Pengadilan Tinggi 126
3. Mahkamah Agung..... 127

B. Kasus Posisi 127

C. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim..... 129
1. Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Wsb 129
2. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 355/PDT/2023/PT SMG 136
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2619 K/Pdt/2024 137

D. Amar Putusan..... 137
1. Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Wsb 137
2. Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 355/PDT/2023/PT SMG..... 139
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2619 K/Pdt/2024 140

BAB IV

TINJAUAN YURIDIS KETEPATAN PENERAPAN KURANG PIHAK DAN KETIDAKJELASAN HUBUNGAN HUKUM SEBAGAI PERTIMBANGAN DALAM PENOLAKAN PERMOHONAN KASASI (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2619K/Pdt/2024) 141

A. Pengaruh Ketepatan Penerapan Kurang Pihak dan Ketidakjelasan Hubungan Hukum Terhadap Pertimbangan dalam Menolak Permohonan Kasasi Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2619 K/Pdt/2024 141
B. Akibat Hukum yang Timbul atas Penolakan Kasasi Berdasarkan Pertimbangan Ketidakjelasan Hubungan Hukum dan Kurang Pihak Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2619 K/Pdt/2024 154
BAB V
PENUTUP 158
A. Kesimpulan 158
B. Saran 159
DAFTAR PUSTAKA 161

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	:	Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional Nomor 86/DK-FH/VIII/2026
Lampiran II	:	Berita Acara Seminar Proposal Skripsi
Lampiran III	:	Catatan Perbaikan Seminar Proposal Skripsi
Lampiran IV	:	Catatan Perbaikan Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi
Lampiran V	:	Tanda Persetujuan Perbaikan Skripsi
Lampiran VI	:	Hasil Turnitin
Lampiran VII	:	Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Wsb
Lampiran VIII	:	Putusan Nomor 355/PDT/2023/PT SMG
Lampiran IX	:	Putusan Nomor 2619 K/Pdt/2024